



**Dinas Perdagangan
Kab. Bantul**



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Bantul 2019

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.

Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id



LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

2019



Kata Pengantar

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2019 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, Januari 2020
Kepala Dinas,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19680216 199303 1003



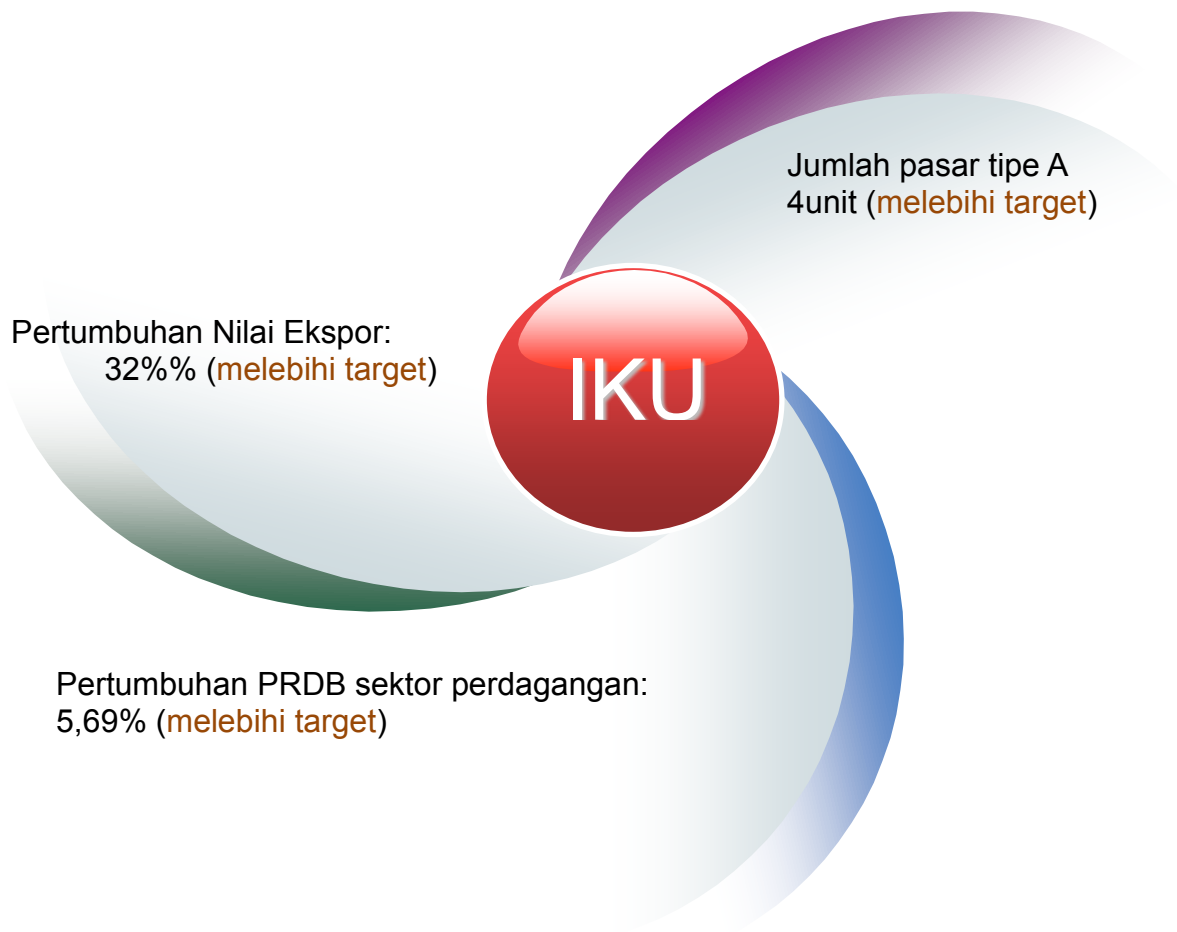
Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 IKU:

No.	IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7,15	32%	Melebihi target
2	Jumlah pasar tipe A	2	4	Melebihi target
3	Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	5,33	5,69	Melebihi target

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sistematika Laporan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	22
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.3 Akuntabilitas Anggaran	54
3.4 Efisiensi Sumber Daya	56
3.5 Kinerja Lain-lain	57
BAB IV. PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 <i>The Next Steps</i>	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2019	11
Tabel 1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis	13
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan	18
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	21
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021	22
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2016-2021	25
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2019	25
Tabel 2.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019	26
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019	28
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2019	30
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019	31
Tabel 3.5	Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2019	32
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	35
Tabel 3.7	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36

Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	37
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	38
Tabel 3.10	Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2019	41
Tabel 3.11	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2019	41
Tabel 3.12	Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2015-2019	41
Tabel 3.13	Jumlah dan Jenis Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019	45
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	46
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang	48
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	49
Tabel 3.17	Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul	50
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2015-2019	52
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	53
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019	54
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	55
Tabel 3.22	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	56
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015-2019	58
Tabel 3.24	Nilai rata-rata unsur pelayanan	59
Tabel 3.25	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	60
Tabel 3.26	Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Perdagangan Tahun 2019	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	11
Gambar 1.2	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1.3	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.4	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 1.5	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia	12
Gambar 3.1	Planning Process	27
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	33
Gambar 3.3	<i>Struktur Ekonomi Bantul</i>	34
Gambar 3.4	PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35
Gambar 3.5	Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	36
Gambar 3.6	Pengendalian BBM	38
Gambar 3.7	Kepala Dinas Kabupaten Bantul menerima sertifikat pasar ber-SNI	47
Gambar 3.8	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2015-2019	49
Gambar 3.9	Perkembangan Ekspor 2015-2019	52
Gambar 3.10	Target dan Realisasi PAD Tahun 2019	58
Gambar 3.11	Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2019	61



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 10 program 24 kegiatan pada tahun 2019 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Perdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
 - 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
4. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
5. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 5.2 Seksi Pendapatan
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
6. UPT



Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, 2019, diolah

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

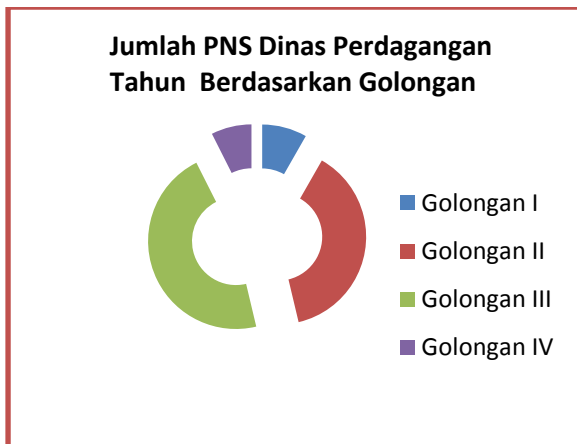
Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan Kabupaten Bantul yang berstatus PNS sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebanyak 109 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Kepala Dinas | : | 1 orang |
| b. Sekretariat | : | 10 orang |
| c. Bidang Pengembangan Perdagangan | : | 7 orang |
| d. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan | : | 9 orang |
| e. Bidang Pengembangan Pasar | : | 73 orang |
| f. UPT Metrologi | : | 9 orang |

Tabel 1.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2019

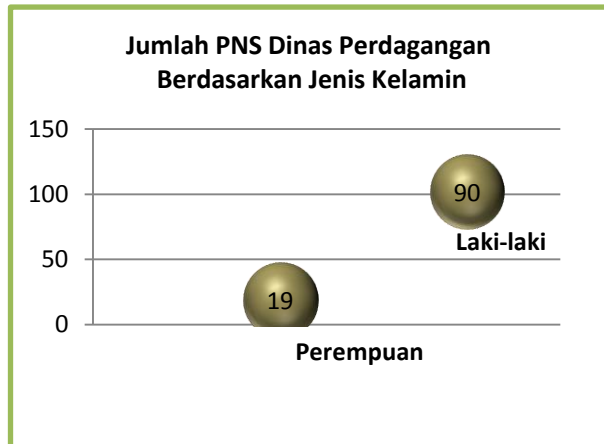
		JENIS PENDIDIKAN					JML	GOLONGAN				JML
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV		
4	7	74	0	12	12	0	109	8	49	43	9	109

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2019



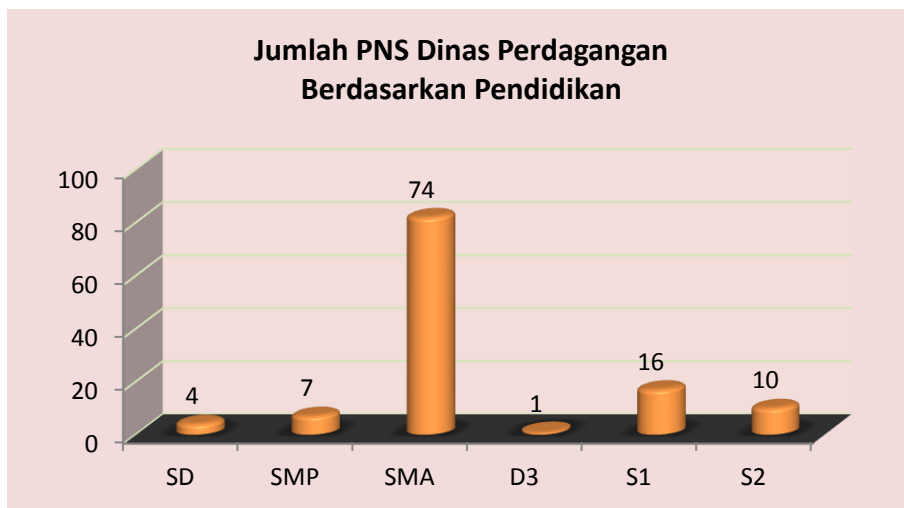
Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2019

Gambar 1.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan



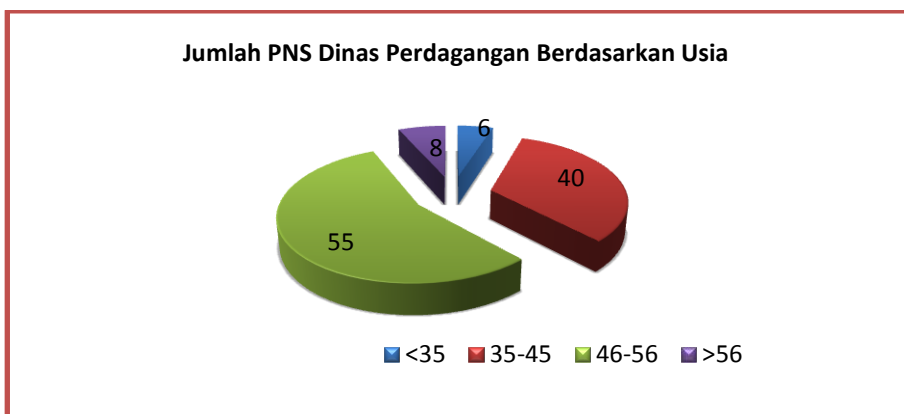
Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2019

Gambar 1.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2019

Gambar 1.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2019

Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia

1.3. Isu Strategis



Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Identifikasi Isu-Isu Strategis.

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
<ul style="list-style-type: none"> - Situasi ekonomi terkait perang dagang - beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal - perdagangan online 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif - Standar Pelayanan pengawasan barang - Pemberitaan media terkait informasi harga - Perlindungan konsumen - Promosi perdagangan - Pengembangan Pasar Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan - Kualitas Data - Kompetensi SDM - Kemudahan pelayanan perizinan usaha - Terbatasnya daya saing produk UMKM - Maraknya rentenir - Kondisi pasar yang terkesan kumuh - Belum tertibnya usaha PKL - Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD - Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat - Pengelolaan SRG - Pengelolaan PSG

Sumber : Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

1.4. Sistematika Laporan



Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;

- Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2019, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : Penutup
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pada Misi 3 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021

Visi Kabupaten: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”								
NO.	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
Terwujudnya kualitas produk perdagangan			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor		Pertumbuhan Nilai Ekspor			

Sumber: RPJMD Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2019-2021, diolah

2.1.1 Visi dan Misi



Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2012-2019, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019. Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Adapun misi ketiga yang diemban oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mencapai visi Kabupaten Bantul dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan mampu memberikan kepastian terhadap ketersediaan bahan pokok strategis dan stabilitas harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Produktivitas UMKM dan pedagang pasar yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. Selain itu sektor perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 yang dijabarkan melalui Dinas Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Tabel 2.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
		Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2016–2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program



Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bantul. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Pengembangan ekspor	1. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
2. Peningkatan sarpras perdagangan	2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat

3. Peningkatan daya saing sdm	3. Pengembangan aspek SDM
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	4. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
5. Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	5. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	6. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTP dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	7. Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Pada tabel 2.4 disajikan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

MISI:
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Peningkatan sarpras perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
		Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
		Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
		Pengembangan ekspor	Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembang produk dan pemasaran produk
		Peningkatan daya saing sdm	Pengembangan aspek SDM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2016-2021, diolah

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Daftar program operasional Dinas Perdagangan seperti berikut ini:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
5. Program Pemberdayaan Pedagang
6. Program Penataan Pasar Rakyat

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Kabupaten Bantul. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	$(\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1) / \text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n-1 \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	$(\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1 \times 100\%$

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2019	2019	2020	2021
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	%	4.61	4.76	5.33	5.62	5.95
		Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	2	3	4
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7.1	7.15	7.2	7.25

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

2.2 Perjanjian Kinerja



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2019 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2019 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Subiyanta Hadi, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 Januari 2019

Pihak Kedua,

Suharsono



Pihak Pertama,

Ir. Subiyanta Hadi, M.M
NIP. 195904011983031013

Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Periode 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,15
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	2
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	5,33

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan Ekspor	%	7.15	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1.724.005.000
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	2	Program Pemberdayaan Pedagang Program Penataan Pasar Rakyat Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.098.125.000 9.159.665.629 2.430.450.000
3	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	5,33	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	369.000.000 1.700.875.000

Sumber : esakip.bantulkab.go.id



2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.430.450.000
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	369.000.000
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.700.875.000
		JUMLAH	4.500.325.000
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Program Pemberdayaan Pedagang	1.098.125.000
		Program Penataan Pasar Rakyat	9.159.665.629
		JUMLAH	10.257.790.629
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.724.005.000
		JUMLAH	1.724.005.000

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Gambar 3.1 Planning Process



Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada

tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2019, data diolah

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

3.1 Capaian Kinerja



Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :






$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja
DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	5,33	5,69	106,75
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	2	4	200
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,15	32%	400

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disimpulkan bahwa 2 indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dan satu indikator dengan kriteria sangat rendah.



Tabel 3.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019

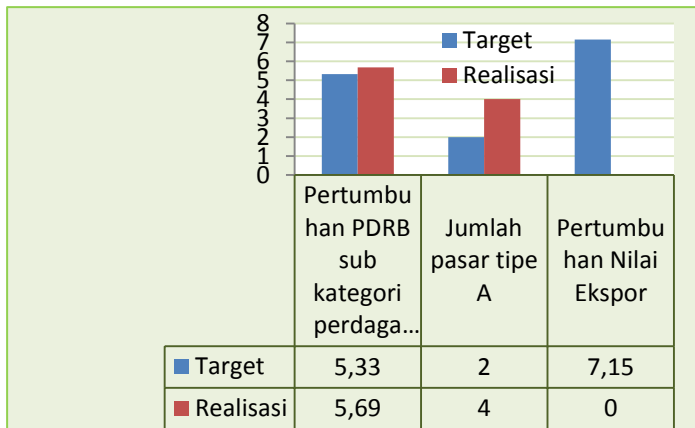
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	%	5,33	Triwulan 1	0	0	0	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sub kategori perdagangan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.655.598.000.000,- rupiah dan tahun 2018 sebesar Rp 1.566.467.000 rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 5,69%
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	5,33	5,69	106,75	
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	2	Triwulan 1	0	0	0	Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	2	4	200	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7,15	Triwulan 1	0	0	0	Nilai ekspor pada tahun 2019 sebesar 151.040.882 US\$ sedangkan pada tahun 2018 sebesar 206.555.464 US\$ sehingga pertumbuhannya menurun sebesar -26,84%. Karena merupakan data pertumbuhan, maka bisa dihitung pada akhir tahun. Komoditas dengan nilai tertinggi adalah tekstil, garment, furniture, dan handicraft. Negara tujuan ekspor antara lain Australia, USA, UK, Japan, Canada, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura
					Triwulan 2	0	0	0	
					Triwulan 3	0	0	0	
					Triwulan 4	7,15	32	400	

Tabel 3.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Perdagangan Tahun 2019

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2019 terhadap 2021 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan						
1.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</i>						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,64	5,33	5,69	106,75	5.95	95,63
	Faktor Penghambat : Tergantung dari data BPS						
	Faktor Pendorong : Karena menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memakai kaidah statistik						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020 : Meningkatkan pelayanan dan pengamanan perdagangan; meningkatkan kualitas SDM pedagang; meningkatkan sarpras perdagangan						
1.2	<i>Meningkatnya kualitas pasar rakyat</i>						
1.2.1	Jumlah pasar tipe A	1	2	4	200.00	4.00	100
	Faktor Penghambat : Untuk mencapai pasar tipe A, banyak persyaratan yang harus terpenuhi						
	Faktor Pendorong : Syarat untuk mencapai pasar tipe A sesuai dengan Permendag Nomor 77/2017 sehingga penentuan indikator memiliki dasar hukum						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020 : melengkapi sarana prasarana						
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan						
2.1	<i>Meningkatnya pertumbuhan ekspor</i>						
2.1.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	13,96	7.15	32%	400	7.25	443.86
	Faktor Penghambat : data ekspor yang tergantung dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY						
	Faktor Pendorong : Data ekspor yang didapat dari Perindag DIY di <i>crosscheck</i> ke masing-masing eksportir yang ada di Kabupaten Bantul						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan nilai ekspor; meningkatkan promosi produk-produk unggulan; pengumpulan data ekspor yang lebih berkualitas						

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Sumber: esakip.bantulkab.go.id, diolah

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan

ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2019;
2. Nilai realisasi tahun 2019 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2019 dengan realisasi pada tahun 2018;
4. Nilai realisasi tahun 2019 dengan realisasi 5 tahun terakhir;
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 per sasaran.

Sasaran 1.
meningkatnya pertumbuhan
PDRB
sektor perdagangan

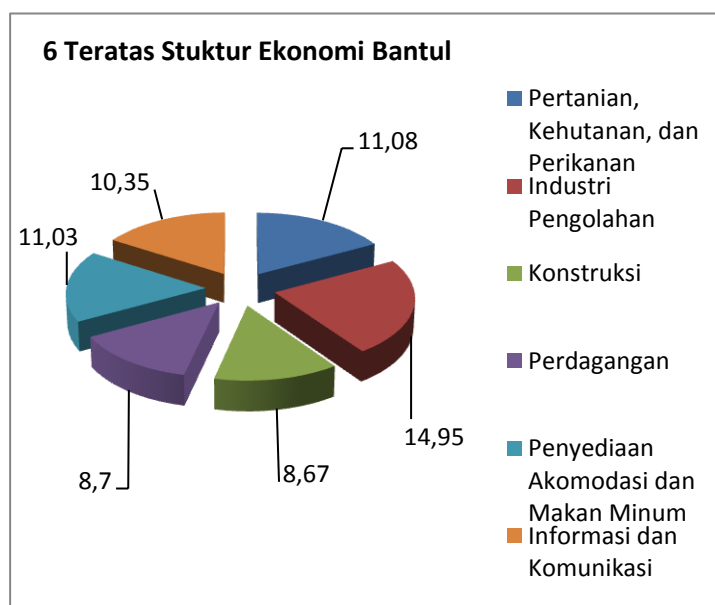
Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB

adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “*commodity flow approach*”. Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (BPS, 2019).



persen terbesar ke 6 setelah kategori Konstruksi.

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Bantul

Sektor Perdagangan merupakan kategori yang cukup potensial berkembang di wilayah Bantul. Pada tahun 2019 kategori ini menyumbang PDRB Bantul sebesar 8,7

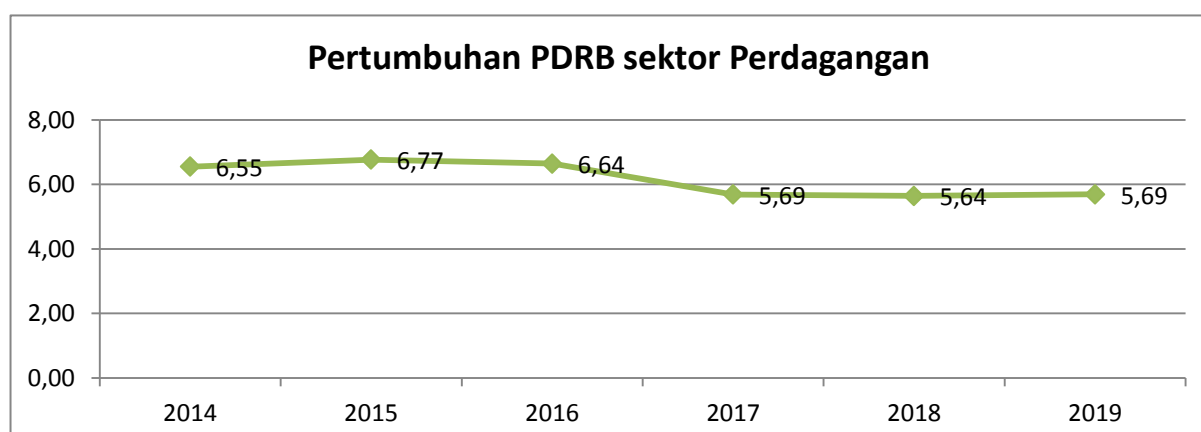
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa ada 6 kategori struktur ekonomi Bantul teratas, dimana andil tertinggi dicapai oleh Kategori industri pengolahan (14,95%), kemudian diikuti oleh kategori pertanian,kehutanan dan perikanan (11,03%), pertanian (11,08%), penyediaan akomodasi makan minum (10,35%), kategori konstruksi (8,67%), dan perdagangan di peringkat keenam dengan andil sebesar 8,7%, dari total 17 kategori.

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	5,64	5,33	5,69	106,75	5,95	95,63

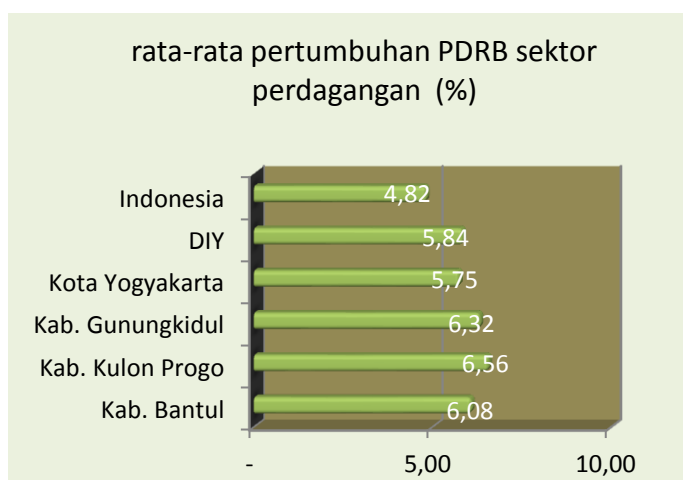
Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah sebesar 5,33%, realisasi sebesar 5,69%, tercapai 106,75% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,64% maka capaian tahun 2019 naik sebesar 0,05%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 5,95%, dengan demikian capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 95,63% dari target akhir Renstra tahun 2021.



Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2019, diolah



Gambar 3.5 Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Perekonomian Bantul di sektor perdagangan mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sekitar 6,08 persen secara riil selama periode 2014-2019. Meskipun tidak seoptimis tahun 2015 yang mencapai 6,77 persen (Gambar 3.4). Namun demikian sub sektor perdagangan di

Bantul menunjukkan kondisi yang semakin membaik dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil.

Berikut ditampilkan data pertumbuhan PDRB sektor perdagangan kabupaten lain, DIY, dan Indonesia. Namun karena data tahun 2019 belum tersedia, sehingga yang ditampilkan adalah angka rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dari tahun 2014 -2018 (5 tahun terakhir).

Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	Rata2/thn
Kab. Bantul	6,55	6,77	6,53	5,64	5,69	6,08
Kab. Kulon Progo	6,52	6,59	8,06	7		6,56
Kab. Gunungkidul	6,89	6,96	6,12	6,01		6,32
Kota Yogyakarta	5,99	5,70	5,72	5,19		5,75
DIY	6,19	6,07	5,72	5,54	6,04	5,84
Indonesia	2,54	4,03	4,46	4,97	7,75	4,82

Sumber: bps.go.id, 2019, diolah

Dari gambar dan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB kategori perdagangan selama tahun 2015-2019, Kabupaten Kulon Progo berada pada urutan pertama dengan angka rata-rata sebesar 6,56 persen, diikuti dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, DIY, kota Yogyakarta, dan Indonesia dengan nilai rata-rata secara berurutan 6,32; 6,08; 5,84; 5,75; dan terakhir 4,82.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	%	7,5	9,8	130,66

Sumber: esakip.bantulkab.go.id



Gambar 3.6 Gedung Metrologi

Indikator program ini adalah cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang. Selama tahun 2019, cakupan alat UTTP yang telah ditera/tera ulang terealisasi sebesar 9,8 persen dari target sebesar 7,5 persen, sehingga prosentase capaian indikator program ini tercapai 130,66 persen. Data ini setara dengan bahwa alat

UTTP yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2019 adalah sebanyak 21.314 unit dari target sebanyak

216.381 unit.

Program Perlindungan Konsumen dan dan Pengamanan Perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dan ketersediaan kebutuhan pokok barang strategis pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.682.020.760,- terealisasi Rp 1.574.654.223,- (96,79%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa tender pembangunan gedung metrologi

Pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib ukur baik dalam hal kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang

berkompeten, Kendaraan operasional yang mendukung mobilitas dan pelayanan prima Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrollogian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2020:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrollogian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber DAK TA 2021
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan

b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi yang ditargetkan <5%)	%	5	2,71	145,8

Capaian indikator program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi harga yang ditargetkan adalah dibawah 5 persen). Data deviasi harga adalah data inflasi Kabupaten Bantul yang bersumber dari BPS Kabupaten Bantul. Pada tahun 2019 angka deviasi harga komoditas strategis adalah sebesar 2,71 persen, yang artinya perbedaan harga komoditas tahun 2019 naik sebesar 2,71 persen dibanding harga pada tahun 2018. Deviasi harga ini dibawah 10 persen sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan (normal).

Pendorong Inflasi 2019:

- Penyesuaian Tarif Dasar Listrik
- Kenaikan tinggi beberapa jenis bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.
- Bulan Puasa dan Hari Raya
- Kenaikan tarif angkutan
- Tingginya permintaan LPG

Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diartikan sebagai ukuran perubahan harga yang diperoleh dengan membandingkan dari waktu ke waktu biaya yang dikeluarkan untuk paket yang tetap dari komoditas yang ditentukan oleh pembelian konsumen di perkotaan.

Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga konsumen dilaksanakan di pasar tradisional/rakyat.

Metode Pendataan 1

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-1.1	Beras, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur, susu bubuk, susu bayi, susu balita, susu kental manis, tahu, tempe, bawang ,cabe, minyak goreng, gula pasir,semen, dan emas perhiasan	Mingguan	Senin dan Selasa
HK-1.2	Mi instan, sosis, nugget, ikan segar, kacang hijau, kacang tanah, garam, kelapa, sabun cuci, bahan celana dan baju, batik, dan lain-lain	2 Mingguan	Rabu dan Kamis dalam minggu 1 & Minggu III

Metode Pendataan 2

Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-2.1	Bihun, tepung beras, daging dalam kaleng, susu wanita hamil, susu rendah lemak, susu cair kemasan, gula merah, kecap, bumbu-bumbuan, margarin, ayam goreng, biskuit, kembang gula, minuman ringan, rokok, kopi bubuk, dan lain-lain.	Bulanan	Mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan hari Kamis
HK-2.2	Pembasmi nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembersih lantai, penyegar ruangan, baju kaos/T-shirt, celana dalam pria, celana panjang jeans, celana dalam wanita, jamu, obat-obatan, pasta gigi, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 5 s/d 15

Metode Pendataan 3

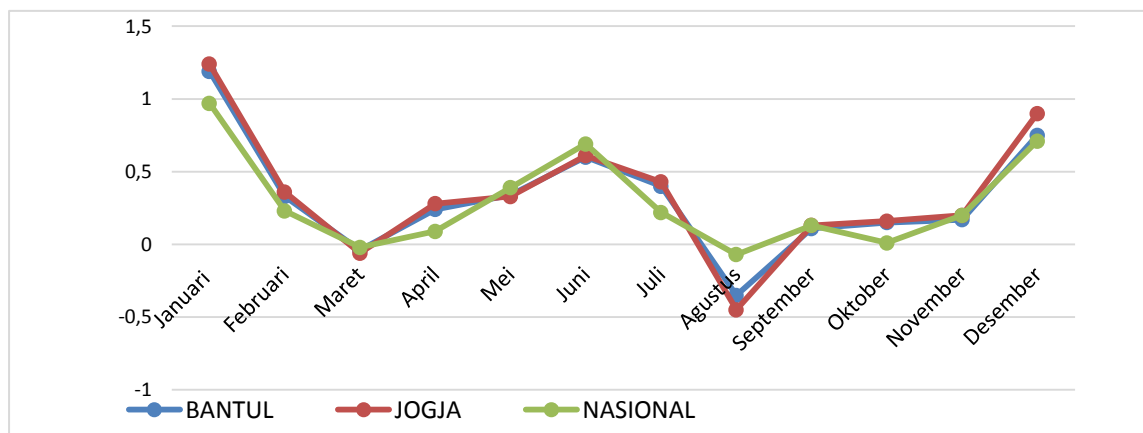
Jenis Daftar Isian	Jenis Komoditas	Frekwensi Pencacahan	Hari Pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)
HK-3	Bahan bangunan, gas elpiji, gelas, kasur, kompor gas, lemari pakaian, setrika, pompa air listrik, jam tangan, TV berwarna, bensin, mobil, sepeda motor, tarif angkutan, HP, jasa keuangan, dan lain-lain	Bulanan	Awal bulan tanggal 1 s/d 10
HKT	Digunakan juga beberapa jenis daftar isian untuk melakukan pencatatan harga, seperti jasa kesehatan, sewa rumah, dan lain-lain		

Tabel 3.10 Tingkat Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2019

Daerah	Inflasi Tahun 2019
Bantul	2.61
Jogja	2.77
Nasional	2,72

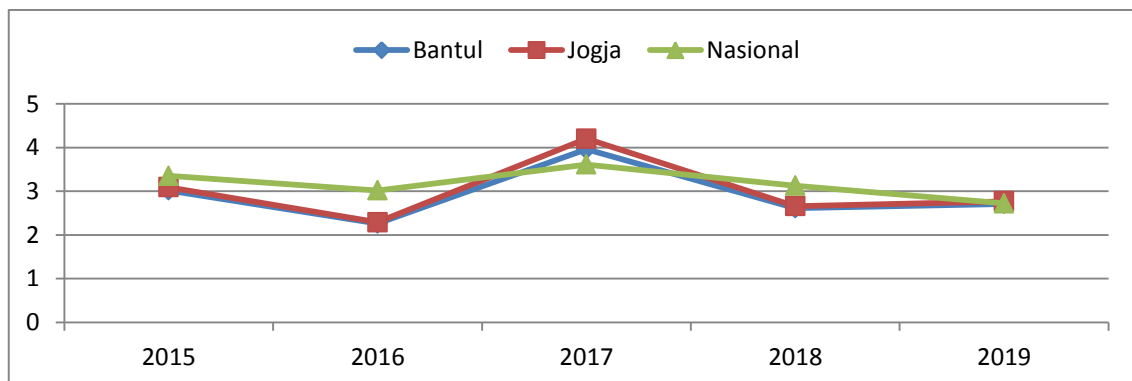
Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 3.11 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2019



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 3.12 Inflasi Bantul, Jogja, Nasional 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp159.828.000,- dengan realisasi sebesar Rp 148.668.500,- (99,92%). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kegiatan mengambil lokasi di Pasar rakyat dan distributor bahan pokok di Kabupaten Bantul. Yang telah dilakukan selama tahun 2019 :

a. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya



Pemantauan harga di Pasar Imogiri

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam,

Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe, dll. Sedangkan untuk barang penting yang dipantau ketersediaan dan harganya meliputi bahan bangunan seperti semen, triplek dan baja di toko bangunan. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau Barang Kebutuhan Pokok yang di bentuk oleh Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan beranggotakan petugas pasar dan pedagang pasar (APPSI)

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha. Menjelang Hari Raya Idul Firti 1440 H kemarin pemantauan dilaksanakan di pasar Niten dan Distributor Daging Sumilir dan Distributor Bawang Merah Kretek. Pemantauan TPID menjelang Hari

Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dilaksanakan di pasar Piyungan dan Distributor Beras Makmur Jaya Piyungan.

b. Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Pasar Murah barang kebutuhan pokok



Operasi Pasar Murni (OPM) Bersama Bulog Divre DIY ke Desa Rawan Pangan di Imogiri

Kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bank Indonesia, Bulog Divre DIY dan distributor barang kebutuhan pokok lainnya yang berlokasi di daerah rawan pangan dan rawak kemiskinan. Komoditas yang dijual meliputi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Lokasi OPM di desa Dlingo, desa Guwosari Pajangan, dan di kecamatan Imogiri yang meliputi desa Wukirsari, Karangtengah, Sriharjo, dan Girirejo.

Pasar Murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan dukungan distributor barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, hari Natal dan Tahun Baru.



c. Operasi pasar (op) dan pasar murah komoditas lainnya

Merupakan kegiatan fasilitasi dari dinas perindustrian dan perdagangan DIY dan bantuan CSR dari Bank Indonesia menghadapi hari raya Idul Fitri 1440 H. Komoditas yang dijual meliputi minyak goreng, beras, gula pasir, telur ayam, terigu, dan daging ayam. Lokasi di Guwosari dan Sendangsari Triwidadi Pajangan, Trimurti Srandakan, dan Imogiri (desa Wukirsari, Kebonagung, Selopamioro).

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan kendala seperti:

- Belum adanya sistem informasi harga barang kebutuhan pokok sehingga informasi belum bisa diketahui masyarakat luas
- belum adanya sasaran penerima dan lokasinya OPM
- kurang intensifnya aparat desa untuk menginformasikan ke masyarakat
- belum adanya subsidi dari APBD untuk menjual barang kebutuhan pokok di bawah HET bagi daerah rawan kemiskinan.

2. Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang



*Monev dari Bappebti ke Gudang SRG Niten
Kab. Bantul*

Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibangun Bappebti dengan tujuan untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan nasional, memberikan alternatif pembiayaan bagi para petani dan UMKM di

daerah untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mendapatkan harga terbaik. Gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul dibangun pada tahun 2009 seluas 600 m² dengan kapasitas penyimpanan 1.400 ton. Gudang tersebut juga dilengkapi dengan penunjang usaha bisnis berupa Dryer/ pengering dengan kapasitas 8 ton, Rice Milling Unit (RMU/ Mesin Penggilingan Gabah) dengan kapasitas 2 ton/jam, alat transportasi berupa truk dan kendaraan roda tiga. Pengelola gudang SRG sampai saat ini masih dipegang oleh KUD Tani Harjo Pandak, meskipun dalam pengelolaannya masih belum optimal. Tujuan SRG ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tunda jual hasil panen yang diresikan di gudang SRG.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- Luas lahan pertanian yang dimiliki petani di Kabupaten Bantul umumnya relatif sempit sehingga hasil panen petani juga sedikit
- Hasil panen petani di konsumsi sendiri dan petani telah memiliki lumbung untuk menyimpan hasil panen sendiri
- Prinsip petani Bantul ada uang ada barang, sehingga lebih suka kalau langsung dijual ke pedagang/ tengkulak
- Proses peresian dinilai membutuhkan waktu lama dan syarat yang rumit (dari mulai uji mutu sampai penerbitan resi yang melibatkan perbankan)

- Kurangnya permodalan pengelola gudang sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan gudang SRG

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan gudang SRG Niten telah dilaksanakan :

a. Sosialisasi Pengelolaan Gudang SRG

Hasil dari Sosialisasi SRG:

- Konsep pola kemitraan petani dengan SRG yang ditawarkan dapat berupa pemberian pinjaman sarana produksi pertanian (bibit/ benih, pupuk) dan asuransi pertanian. Setelah diproduksi oleh petani, diharapkan hasil panen bisa dijual ke SRG dan disimpan di gudang melalui mekanisme resi gudang;
- Intervensi perubahan yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); budaya kerja (strategi pelayanan, kerjasama tim, dll); dan tujuan organisasi (visi, misi, nilai, strategi);
- Pengelolaan keuangan petani sangat penting untuk dilakukan dari mulai persiapan tanam sampai pasca panen untuk menilai seberapa besar keuntungan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

b. Temu Usaha

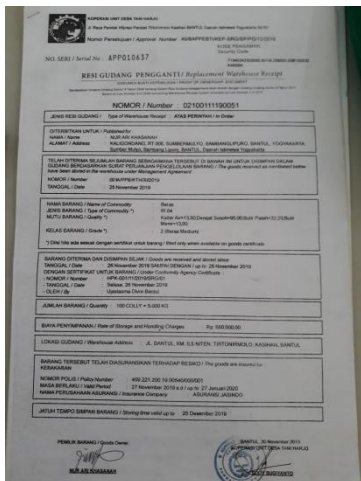
Hasil Temu Usaha dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan gudang SRG perlu didukung :

- Stanby Buyer (Pasar lelang, Buyer SRG sendiri)
- Lembaga Penyangga yang dapat diperankan perum Bulog dengan mendukung, membeli, dan *Temu Usaha SRG* mendistribusikan barang dari gudang dalam kerangka Stock Pangan Nasional
- Perusahaan pengguna komoditi/ pelaku usaha seperti Perpad
- Pedagang sebagai Off Taker dan Pasar Komoditi
- Kesepahaman bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, sektor swasta, serta pelaku usaha untuk membangun SRG yang berhasil guna



Temu Usaha SRG

c. Monitoring dan Evaluasi



Bukti penerbitan Resi Gudang pada Desember 2019

Monitoring ke gudang SRG telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaannya. Namun demikian, untuk tahun 2019 pengelolaan gudang mengalami kendala dari segi permodalan pengelola SRG (KUD Tani Harjo Pandak) sehingga baru bisa terbit resi 1 senilai Rp. 42.500.000,- dengan kapasitas 5 ton. Monitoring juga telah dilakukan oleh Bappebti ke gudang SRG dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan gudang SRG di Kabupaten

Bantul. Untuk evaluasi pelaksanaan pengelolaan gudang SRG juga telah dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait yang masuk dalam anggota Tim Optimalisasi SRG

3. Pelayanan Pengamanan Perdagangan

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang antara lain bertujuan untuk : a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; e) meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen perlu dilakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan perdagangan.



Pemantauan distribusi dan HET gas LPG 3 kg di pangkalan

Ruang lingkup pengawasan perdagangan meliputi : pengawasan terhadap barang yang dilarang, diatur dan diawasi peredarannya; pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi; pengawasan terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting; serta pengawasan terhadap ketersediaan/ stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pelaksanaan pengawasan perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, yang di dalamnya mengatur : a) obyek pengawsan; b) parameter pengawasan; c) mekanisme pengawasan. Sedangkan untuk pelaksana pengawasan kegiatan perdagangan dapat dilakukan oleh : a) Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN); b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG); c) PNS yang telah diusulkan Dirjen PKTN Kemendag. Untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perdagangan dibentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Terpadu dengan SK dari Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul yang beranggotakan dari Polres, Kodim, Satpol PP serta instansi teknis terkait.

Dalam rangka peningkatan pengawasan perdagangan, Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya antara lain:

a. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan HET gas LPG 3 kg

Di Kabupaten Bantul terdapat 12 agen dan 1.036 pangkalan LPG 3 kg yang bertugas sebagai penyalur kebutuhan LPG bagi masyarakat. Lingkup pemantauan dan pengawasan yang dilakukan adalah penyaluran/ distribusi dan harga serta penggunaan LPG 3 kg apakah sudah tepat sasaran. Dari hasil pemantauan dan pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di pangkalan didapatkan bahwa secara umum distribusinya cukup lancar dan harganya bervariasi dari Rp. 15.500,- sampai Rp. 18.000,-/ tabung, hanya untuk daerah yang medannya sulit seperti Dlingo distribusinya masih kurang merata dan harga cenderung lebih mahal sampai Rp. 20.000,-/tabung. Sedangkan untuk ketersediaan/ stok LPG 3 kg cukup aman, meskipun sempat terjadi kelangkaan menjelang hari besar keagamaan namun sudah dapat teratasi dengan adanya penambahan kuota fakultatif dari Pertamina.

Pemantauan dan pengawasan penggunaan LPG 3 kg juga dilakukan di beberapa rumah makan dan peternakan ayam. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk penggunaan LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga miskin dan industri mikro, sedangkan untuk usaha komersial tidak diperkenankan. Dari hasil pemantauan dan pengawasan masih ditemukan beberapa rumah makan dan peternak ayam yang menggunakan LPG 3 kg usahanya. Oleh Pertamina saat itu juga dilakukan penukaran tabung dari 2 tabung LPG 3 Kg ditukar 1 tabung LPG 5,5 kg serta diberi surat pernyataan dari Dinas Perdagangan untuk tidak memakai lagi tabung gas LPG 3 kg.

- b. *Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan HET pupuk bersubsidi*
 Sesuai dengan Permendag No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, Dinas Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi, mutu pupuk dan HET di tingkat distributor dan pengecer/ kios resmi. Di Kabupaten Bantul terdapat 6 distributor dan kurang lebih 60 kios pengecer resmi pupuk bersubsidi. Jenis pupuk bersubsidi yang dipantau meliputi Urea, SP-36, ZA, Phonska dan Petroganik. Dari hasil pantauan di beberapa distributor dan kios pengecer resmi diperoleh bahwa secara umum distribusi, harga dan mutu pupuk bersubsidi sudah sesuai aturan.
- c. *Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan HET barang kebutuhan pokok*



Pembinaan dan pemantauan bersama Balai POM Yogyakarta ke pasar rakyat

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dilakukan pemantauan dan pengawasan baik pada saat kondisi normal maupun menjelang hari besar keagamaan nasional. Pemantauan dilakukan di beberapa distributor/ pelaku usaha barang kebutuhan pokok (bapok) seperti beras, telur, daging, bawang merah, cabai, gula pasir, minyak goreng & terigu maupun di pasar rakyat. Secara umum dari hasil pemantauan untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok cukup aman, harga dibawah HET dan distribusi lancar.

- d. *Peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan*
 Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk olahan pangan dilakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di beberapa pasar rakyat di kabupaten bantul. Pemantauan dilaksanakan oleh tim terpadu bersama dengan Balai POM Yogyakarta. Sasaran yang dipantau adalah produk olahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin/ pengawet, rhodamin b/ pewarna merah, boraks/ pengental.
- e. *Peredaran gula kristal rafinasi*



Pemakaian GKR untuk industri pembuatan gula merah dan gula batu

Sesuai Permendag Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi disebutkan bahwa Gula Kristal Rafinasi (GKR)

merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi industri makanan dan minuman yang tidak boleh diperdagangkan secara eceran. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada industri pengguna dan pelaku usaha IKM/UKM yang menggunakan GKR sebagai bahan baku proses produksi, melakukan sosialisasi kebijakan perdagangan GKR sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap penjualan GKR yang tidak sesuai peruntukan.

Pembinaan, pemantauan dan pengawasan perdagangan GKR telah dilakukan di 8 pasar rakyat di Kabupaten Bantul bersama Disperindag DIY. Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Masih ditemukan adanya perdagangan GKR di beberapa pasar rakyat di Kabupaten Bantul, baik yang dijual murni GKR maupun yang dicampur dengan gula konsumsi. Hal ini disebabkan karena masih banyak pedagang yang belum mengetahui secara detail GKR, baik bentuk maupun ciri-cirinya.
- Rata-rata pedagang juga belum memahami adanya aturan terkait perdagangan GKR

f. Bimbingan Teknis Pemakaian Tes Kit Bahan Berbahaya

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi dan bekal kepada pengelola pasar dan APPSI terkait penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dan cara pengujiannya sehingga diharapkan dari pengelola pasar rakyat bisa melakukan pengawasan secara mandiri.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan pengamanan perdagangan antara lain:

- Tidak adanya pelaksana pengawasan seperti PPNS-DAG dan PPTN di Dinas Perdagangan sehingga terkendala dalam melakukan penindakan jika ditemukan adanya pelanggaran.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 terkait pengendalian harga barang pokok dan bahan penting lainnya antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
2. Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;

3. Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
4. Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;



Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu.

Pada tahun 2019 ini, dilaksanakan pembangunan gedung khusus PKL di Telaga Desa Baturetno, Kec. Banguntapan. Selain itu, pada tahun 2018 telah berhasil dibangun Pusat Kuliner Taman Angkrusari di Dusun Tegalsari, Desa Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul. Namun demikian, bangunan yang sudah jadi belum sepenuhnya memadahi karena minimnya anggaran. Sehingga pada tahun 2019, Pemerintah Kab. Bantul melalui Dinas

Perdagangan kembali menganggarkan pembangunan atau lebih tepatnya penambahan fasilitas yang sebelumnya belum terpenuhi.

Penataan PKL dapat berjalan dengan lancar tak lepas karena adanya sinergi dan kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan jajaran pengurus DPD APKLI maupun DPC APKLI. Diharapkan untuk kedepannya dengan adanya tempat kuliner ini memberikan dampak positif untuk Pedagang kaki lima dari segi peningkatan ekonomi khususnya. Selain itu, kegiatan atau aktivitas ekonomi yang sudah tercipta dapat berkelanjutan pasca kegiatan ini berlangsung.

Kendala yang terjadi pada koordinasi dengan para PKL yang sebagian besar menolak untuk dipindah karena takut kehilangan pelanggan sehingga nantinya tidak ramai lagi. Penjelasan yang diberikan harus persuasif supaya lebih mengena.



Proses pembangunan tempat kuliner Banguntapan

*Sasaran 2.
meningkatnya kualitas
pasar rakyat*

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang

bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten. Target pasar tipe A sebanyak 2 unit pada tahun 2019 tercapai 200 persen. Pada tahun 2019

Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah pasar tipe A (unit)	1	2	4	200	4	100

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Pasar Imogiri pada tahun 2017 lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015. Sertifikat ini berlaku sampai tahun 2019. Pasar Imogiri telah melakukan surveylan untuk mempertahankan sertifikat SNI ini. Perbaikan dan perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu dilakukan.



Kabupaten Bantul patut berbangga menyusul keberhasilan Pasar Imogiri dalam mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015. Seritifkasi ini diperoleh dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Dengan demikian Pasar Imogiri di Bantul ini menjadi satu-satunya pasar rakyat ber-SNI di wilayah DIY.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. **Penataan Pasar Rakyat**

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Program Penataan Pasar Rakyat

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Penataan Pasar Rakyat	cakupan jumlah kondisi pasar baik	%	72,73	62,5	85,93

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2019 sebesar 62,5 persen atau prosentase capaian terhadap target sebesar 85,93 persen. Sampai dengan akhir tahun 2019 di Kabupaten Bantul terdapat 20 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel 3.17:

Tabel 3.17 Data Kondisi Pasar Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Kondisi Pasar	Ket
1	Pasar Bantul	Kurang Baik	Atap, lantai, selasar, hydrant
2	Pasar Niten	Kurang Baik	Atap, lantai, ketersediaan air bersih
3	Pasar Imogiri	Baik	-
4	Pasar Piyungan	kurang baik	Atap, saluran air di los ikan dan daging belum ada, ketersediaan air bersih, hydrant
5	Pasar Sorobayan	kurang baik	Atap dan tempat sampah
6	Pasar Mangiran	rusak	Atap, lantai, drainase, konstruksi bangunan memerlukan rehab total
7	Pasar Gumulan	rusak	Sebagian besar los dalam kondisi rusak dan tidak layak, pagar belum ada
8	Pasar Pijenan	Kurang Baik	Ketersediaan air bersih
9	Pasar Sungapan	Baik	Kamar mandi dan TPS
10	Pasar Semampir	Baik	Septiktank
11	Pasar Celep	Baik	Musholla
12	Pasar Jodog	kurang baik	Atap, sirkulasi cahaya dan

			udara, lantai
13	Pasar Angruksari	Baik	Masih terdapat beberapa tampias air hujan
14	Pasar Turi	kurang baik	Banyak bangunan non permanen yang tidak layak
15	Pasar Pundong	kurang baik	Masih banyak los yang kondisinya tidak layak
16	Pasar Gatak	kurang baik	Atap dan lantai
17	Pasar Barongan	kurang baik	Atap, lantai, pagar
18	Pasar Dlingo	kurang baik	Akses jalan masuk, los hewan belum ada atap
19	Pasar Jejeran	Baik	Masih terdapat tampias dan kurang pagar pasar
20	Pasar Pleret	kurang baik	Diperlukan perbaikan atap dan talang
21	Pasar Ngipik	Baik	-
22	Pasar Panasas	Baik	Perlu rehabilitasi drainase
23	Pasar Klithikan Niten	kurang baik	Rehabilitasi kantor pengelola pasar
24	Pasar Hewan Imogiri	Baik	Kantor dan mck
25	Pasar Hewan Pandak	Baik	-
26	Pasar Janten	Baik	Perlu rehabilitasi sebagian atap yang bocor
27	Pasar Jragan	Baik	-
28	Pasar Koripan	Baik	Tempat sampah sementara dan atap
29	Pasar Grogol	Baik	Penyempurnaan tempat sampah
30	Pasar Bendosari	Baik	-
31	Pasar Sangkeh	Kurang baik	Kantor, pagar, mck, lanscape
32	Pasar Seni Gabusan	Baik	-

Sumber Data: Dinas Perdagangan, 201

Beberapa pembangunan/rehabilitasi pasar yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 :



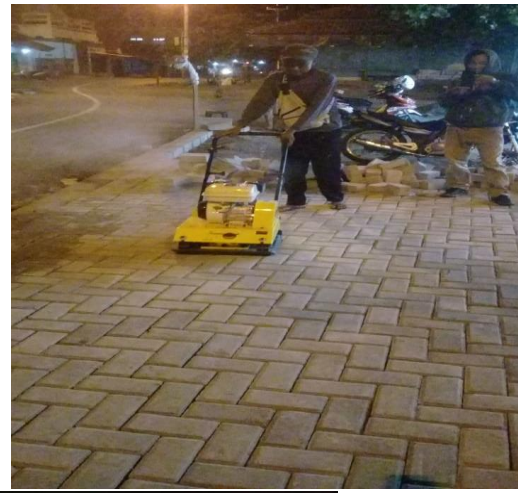
*Pembangunan mushola pasar Dlingo
Rehab pasar Piyungan*



Calon lokasi untuk rehab pasar Turi



Pembangunan mushola pasar klitikan Niten



Rehab pasar Panasan, los ikan pasar Imogiri, paving block pasar Bantul

Pada tahun 2019 juga dilaksanakan revitalisasi Pasar Seni Gabusan. Pasar ini dibangun pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada awal mula tujuan dibangunnya pasar ini adalah sebagai sarana dan prasarana bagi para pengrajin dalam upaya memfasilitasi tempat untuk memasarkan hasil kerajinannya. Dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi terkait, diharapkan PSG dapat menjadi salah satu *destinasi* wisata dari para *tourist* yang hendak membeli cinderamata atau oleh-oleh khas dari Kab. Bantul



b. Pemberdayaan Pedagang

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	4.6	0,47	10,22

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya. Rumus indikator program ini adalah (jumlah omzet pedagang pasar rakyat tahun 2019 – jumlah omzet pasar tahun 2018) / (jumlah omzet pedagang tahun 2018) x 100%. Dari target pertumbuhan sebesar 4,6 persen,

ternyata pada tahun 2019 terjadi kenaikan omzet pedagang sebesar 0,47% dibanding omzet tahun 2018.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program ini antara lain:

a. *Pelatihan Pedagang Pasar Rakyat*

Dari pelatihan ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan SDM Para Pedagang Rakyat khususnya dalam hal pengelolaan APPSI
- Melatih kemandirian APPSI dalam mengelola Pasar Rakyat
- Memberikan semangat kepada APPSI agar lebih berdaya di Pasar Rakyat
- Pengurus APPSI dapat menyusun program kerja dan Anggaran Belanja
- Pengurus APPSI dapat menyusun/merencanakan pendapatan APPSI
- Dapat menjadi sarana yang efektif untuk ajang diskusi antar pedagang.
- Pengenalan inovasi baru untuk berdagang.



b. *Grebeg Pasar*

Grebeg Pasar merupakan suatu acara untuk memperkenalkan produk unggulan masing masing Pasar Kabupaten se-Kabupaten Bantul dalam satu wadah Bazar Produk unggulan Pasar, sehingga pasar

dapat memertahankan eksistensisebagai salah satu ya serta menjadi upaya/ langkah mengajak masyarakat belanja hemat di pasar rakyat

c. *Lomba Pasar Bersih dan Sehat*



Menciptakan Pasar Rakyat yang Sehat, Bersih, Aman dan Nyaman yang didukung perilaku Hidup Sehat oleh Pedagang Pasar Rakyat merupakan usaha yang harus dilakukan.

Penilaian Lomba Pasar Bersih dan Sehat

Dari lomba pasar sehat ini diharapkan:

- Menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga nantinya akan menjadi budaya pada tiap pasar.
- Memperkenalkan peran serta APPSI dalam pengelolaan Pasar Rakyat
- Turut serta menjaga sarana dan prasarana yang ada di masing masing pasar.

Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pelaksanaan program ini adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar
2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. merupakan hasil terus menerus dan berkelanjutan dari promosi pasar
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dangangnya melalui media online
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI



Gambar 3.8 Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2014-2019

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 dan telah memberikan kontribusi pendapatan jasa sebesar Rp141.200.000,- Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul yang berjumlah 13.655 orang, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

Sasaran 3.
Meningkatnya
pertumbuhan ekspor

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor.. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah sebesar 7,15%, realisasi sebesar 32%, atau nilai ekspor Kabupaten Bantul naik sebesar 32%.

Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor	13,96	7.15	400	32%	7,25	443,86

Sumber: e sakip.bantulkab.go.id

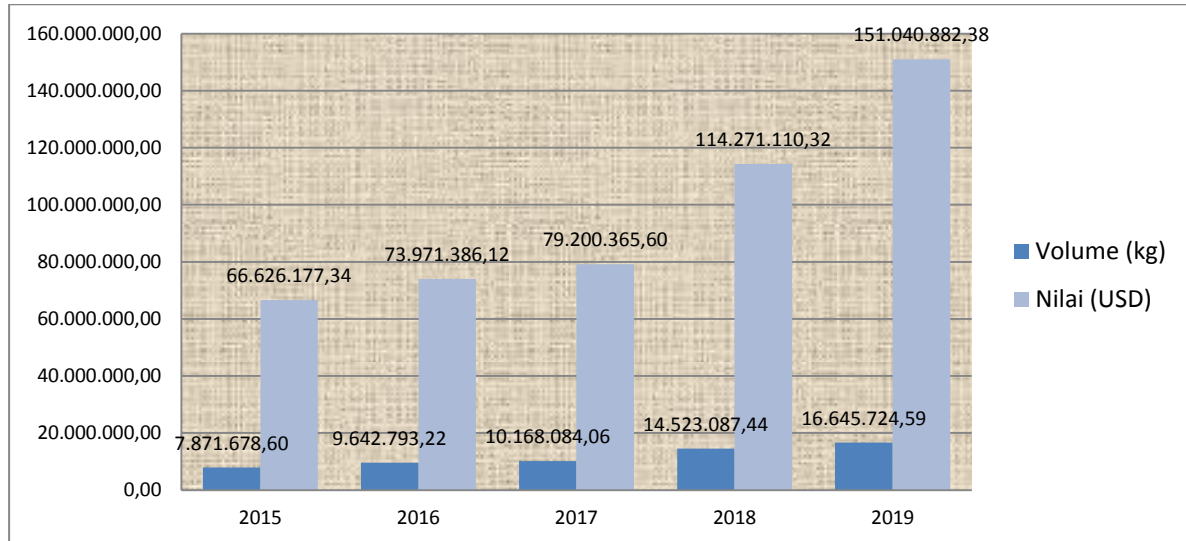
Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2019 mencapai US\$151 juta naik 32 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Selain itu peningkatan nilai ekspor diduga disebabkan oleh penguatan dolar.

Upaya memacu ekspor menghadapi tantangan luar biasa karena ekonomi global yang melambat, namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor antara lain:

1. Mempermudah izin ekspor untuk produk UMKM seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menggratiskan biaya sertifikasi agar harga produk UMKM Indonesia dapat bersaing pada pasar global
2. Memberikan insentif pajak ekspor bagi pelaku UMKM. Adapun, insentif lain yang diperlukan adalah penurunan biaya transportasi, perlindungan hukum untuk pasar luar negeri
3. Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kualitas produk
4. UMKM harus bertransformasi ke arah ekonomi hijau. Produk hijau saat ini sedang digandrungi pasar global. Di mana-mana permintaannya adalah produk hijau, dapat dimulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan
5. Marketplace sangat potensial untuk menjadi shortcut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menjangkau pasar yang lebih luas. pelaku UMKM harus memiliki keunikan khusus agar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Mereka yang

memiliki keunikan produk serta kapasitas dan kontinuitas produksi akan memenangkan persaingan. Semua pelaku UMKM harus segera bertransformasi ke arah digital.

Gambar 3.9. Perkembangan Ekspor 2014-2019



Tabel 3.18 Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2014-2019

Sumber: Dinas Perdagangan, 2015-2019, diolah

3.3 Akuntabilitas Anggaran



Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Volume ekspor	7.871.678,60	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06	16.645.724,59
2	Nilai ekspor (US\$)	66.626.177,34	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.454	151.040.882,38
3	Jumlah Negara	43	42	77	83	79
4	Macam komoditi	36	36	34	43	39

adalah sebesar Rp 23.081.597.211,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp 22.347.518.723,- atau sebesar 96,82%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3.361.563.260	3.192.090.024	94,96
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	9.635.585.832	9.425.767.374	97,82
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	1.510.315.000	1.502.871.750	99,51
Jumlah		14.507.464.092	14.120.729.148	97,33
Belanja Langsung Pendukung		8.574.133.119	8.226.789.575	95,94
Total Belanja Langsung		23.081.597.211	22.347.518.723	96,82

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp14.507.464.092,- terealisasi sebesar 97,33% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp8.574.133.119,- terealisasi sebesar 95,94% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat dengan besaran anggaran 41,74% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor sebesar 6,54% dari total anggaran belanja langsung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 96,82% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **efektif**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,33% (kategori efektif), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,94% (kategori efektif).

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan ekspor sebesar 99,51%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU pertumbuhan PDRB kategori perdagangan sebesar 94,96%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,33	5,69	106,75	3.361.563.260	3.192.090.024	94,96
2	Jumlah pasar tipe A	2	4	200	9.635.585.832	9.425.767.374	97,82
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7,15	32%	400	1.510.315.000	1.502.871.750	99,51

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

3.4 Efisiensi Sumber Daya



Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3.361.563.260	3.192.090.024	169.473.236	5,04
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	9.635.585.832	9.425.767.374	209.818.458	2,18

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
3	Pertumbuhan ekspor	1.510.315.000	1.502.871.750	7.443.250	0,49
Jumlah		17.098.912.579	14.507.464.092	386.734.944	2,67
Belanja Langsung Pendukung		7.584.784.762	8.574.133.119	347.343.544	4,05
Total Belanja langsung		24.683.697.341	23.081.597.211	734.078.488	3,18

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	200	97.82	2.18
2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	106,75	94,96	5

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Perdagangan sebesar 3,18% atau setara dengan Rp734.078.488,-. Silpa tersebut merupakan sisa dari tender pelaksanaan pekerjaan fisik seperti revitalisasi pasar/rehabilitasi pasar dan pembangunan gedung metrology serta honorarium tenaga kontrak.

3.5 Kinerja Lain-lain

3.3.1 Sertifikat ISO 9001:2015

Salah satu kegiatan di Dinas Perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Tahun 2019 adalah tahun kedua Dinas Perdagangan mendapatkan sertifikat ISO. Dasar dalam penerapan ISO 9001:2015 di Pemerintahan yaitu Pelayanan Publik sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. ISO ini penting bagi pelayan publik karena ini merupakan pengakuan dari lembaga yang mensyaratkan variabel-variabel sistem manajemen yang harus dipenuhi OPD;

ISO 9001: 2015 adalah standar dokumen (Standard/ Persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Ada beberapa dokumen standar yang berbeda dalam ISO 9000 , tapi hanya ISO 9001-2015 yang bisa disertifikasi. ISO 9001: 2015 adalah standar terbaru dari Sistem Manajemen Mutu ini, dan “2015” adalah tahun revisi terbaru dari sistem Manajemen Mutu itu.

Untuk proses ISO ini ada 2 tahapan. Tahapan I adalah persiapan, dimana dilakukan beberapa kali pendampingan untuk pelatihan pemahaman/awareness, pembentukan Tim

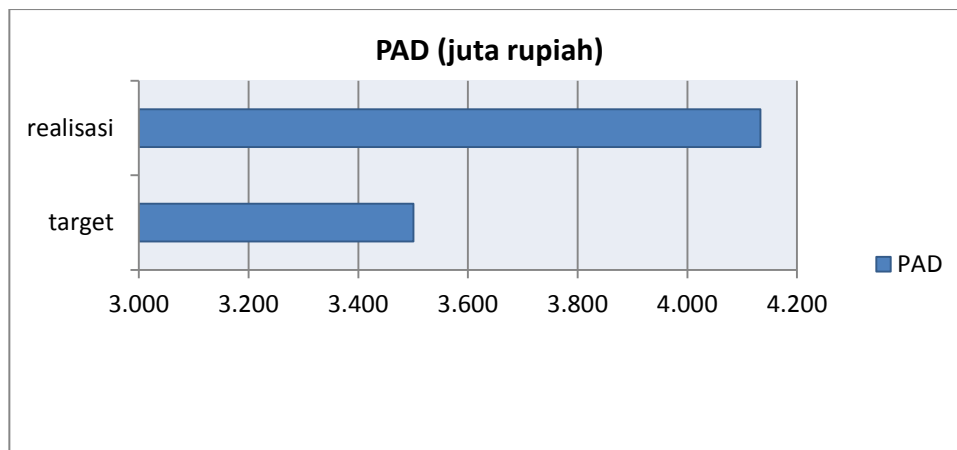


ISO, pendampingan audit internal, komplain, dan resiko, pembuatan dan pengesahan dokumen, serta persiapan audit sertifikasi. Dalam hal pendampingan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibantu oleh Pendamping ISO dari CV. Gama Solution (tim Qomarudin, M.Kes);

Hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait ISO 9001:2015 antara lain adalah beberapa dokumen ISO (Standar Operasional Prosedur) antara lain Buku Manual Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Sasaran Mutu; laporan tim survey/komplain, laporan tim resiko, dan laporan tim audit internal; Setelah tahapan persiapan selesai, dilakukan proses tahapan II yaitu proses audit oleh lembaga sertifikasi. Untuk audit, Auditor untuk proses sertifikasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional NQA Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 2019 akhirnya Dinas Perdagangan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 .

3.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, tera/tera ulang, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.500.300.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 4.132.957.810,- atau terealisasi sebesar 118,07%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 3.10 Target dan Realisasi PAD Tahun 2019

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	3.380.549.050	3.690.777.725	109,18%
2016	2.700.000.000	2.893.491.150	107,17%
2017	3.423.000.000	3.732.640.519	109,05%
2018	3.274.494.000	3.873.985.940	118,31%
2019	3.500.300.000	4.132.957.810	118,07%

3.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Tabel 3.24 Nilai rata-rata unsur pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,418
U2	Prosedur	3,327
U3	Waktu pelayanan	3,389

U4	Biaya/tarif	3,734
U5	Produk layanan	3,564
U6	Kompetensi pelaksana	3,394
U7	Perilaku pelaksana	3,163
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,383
U9	Sarana dan prasarana	3,597

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa 9 unsur pelayanan memperoleh nilai persepsi di atas 3 dengan nilai tertinggi pada unsur Biaya/tarif. Ketiga unsur dengan nilai tertinggi adalah:

- a. Biaya/tarif
- b. Sarana dan prasarana
- c. Produk layanan

Hal tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi informasi terkait biaya/tarif pelayanan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah diketahui oleh masyarakat. Informasi yang sampai di masyarakat ini harus tetap dipertahankan.

Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah pada unsur perilaku pelaksana dalam pelayanan. menggambarkan bahwa pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk perilaku dalam pelayanan masih perlu dievaluasi dan diperbaiki

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan Tahun 2019 adalah **86,02**

Tabel 3.25 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 -64,99	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	76,61 -88,30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 86,02 dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori “ **BAIK**”.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.



Gambar 3.11 Dokumentasi Berbagai Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2019



Sambutan Asisten Sekda Kabupaten Bantul pada Opening Meeting ISO 9001:2015



Sambutan Ketua Tim Audit Eksternal ISO 9001:2015



Grebeg Pasar



Closing Meeting Audit Eksternal ISO 9001:2015



Pelatihan Manajemen Perdagangan Luar Negri



Pengawasan penggunaan LPG oleh usaha kecil menengah



Proses pembangunan kawasan PKL

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi dua IKU telah tercapai sesuai dengan target, namun ada yang jauh dibawah target, Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya IKU yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

4.2 *The Next Steps*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini

akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Berikut permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan pencapaian target indikator kinerja:

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya gejolak harga cabai karena kurangnya pasokan • Gejolak harga bawang merah (produksi Bantul) kalah bersaing dengan kualitas kompetitor 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pasokan dengan kemitraan dengan pelaku usaha. • Fasilitasi dengan stakeholder/shareholder dalam memberikan nilai tambah produk cabai merah • Revitalisasi Pasar Lelang Bawang Merah di Parangtritis, Kretek
2	Fungsi gudang dengan mekanisme resi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pengelola gudang SRG • Optimalisasi pengelolaan gudang SRG
3	Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum bisa dilaksanakan oleh Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dengan kominfo dalam penyediaan jaringan internet • Peningkatan kapasitas admin sibapok untuk 5 pasar sampel (Pasar Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri, Pijenan) • Monev kegiatan sibapok di 5 pasar sampel
4	Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	Revitalisasi PSG : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarpras (panggung hiburan, public area, industri pariwisata, relokasi PKL) → kemitraan/program kolaboratif • Pengelolaan pedagang • Peningkatan kapasitas pengelolaan PSG (aspek product, harga product, aspek promosi, aspek tempat)
5	Omzet pedagang pasar tidak mengalami peningkatan secara signifikan karena kurangnya daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • regulasi perubahan jam operasi pasar • promosi pasar antara lain melalui undian hadiah dan promo/diskon secara berkala • mendorong pedagang pasar untuk melakukan inovasi teknik penjualan
6	<ul style="list-style-type: none"> • Empat puluh satu persen (13 pasar) dalam kategori kurang baik • Enam persen (2 pasar) dalam kategori rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehab sedang untuk 13 pasar (Bantul, Niten, Piyungan, Sorobayan, Pijenan, Jodog, Gatak, Barongan, Pleret Klithikan Niten dan Sangkeh) • Rehab berat untuk Pasar Mangiran dan Pasar Gumulan
7	Tiga puluh delapan persen (32 pasar) Penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penguasaan kepemilikan tanah kas desa dan Sultan Ground untuk pasar rakyat dan kawasan PKL. • Sewa tanah kas desa untuk pasar rakyat
8	Penataan dan pemanfaatan los pasar bantul lt.2 belum optimal	Revitalisasi Lt.2 Pasar Bantul

No.	Permasalahan	Solusi
9	Penyelenggaraan kemetrolgian yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Updating data wajib tera • Sosialisasi • Pengawasan kemetrolgian • Peningkatan kapasitas untuk SDM • Penyempurnaan gedung metrologi • Pengadaan alat standar kemetrolgian

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN

Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon (0274)367338 Faks (0274)367504
Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id
website: perdagangan.bantulkab.go.id